

Republik Indonesia

KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2023

KEMENTERIAN LHK

Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan







Kebijakan Fiskal 2023





ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

"Konsolidasi Fiskal dengan tetap responsif dan antisipatif"







TEMA KEBIJAKAN FISKAL

"Konsolidasi Fiskal yang Berkualitas untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan"

KEBIJAKAN FISKAL





UNGGUL









MENGATASI SCARRING EFFECT DAN LIVING WITH ENDEMIC



MENDUKUNG GREEN ECONOMY

MOBILISASI PENDAPATAN YANG INOVATIF

- Meningkatkan Tax Ratio dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (UU HPP);
- Optimalisasi pengelolaan PNBP al. pengelolaan SDA dan inovasi pengelolaan aset;
- Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

BELANJA NEGARA YANG EFEKTIF

- Konsistensi implementasi spending better (ZBB);
- Mendorong subsidi yang tepat sasaran dan efektivitas bansos;
- Penguatan kualitas desentralisasi fiskal;
- Strategi mitigasi risiko yang solid dan meningkatkan fleksilbilittas (automatic stabilizer)

PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE

- Pembiayaan kreatif dan inovatif (KPBU, SWF, SMV)
- Defisit dan rasio utang menurun;
- Percepatan keseimbangan primer menuju positif;
- Pengendalian kerentanan (DSR,IR,CBB);
- Pembiayaan investasi yang selektif;
- Pendalaman pasar keuangan domestik



FOKUS KEBIJAKAN FISKAL 2023



SDM UNGGUL

- Kesehatan → Produktif (Promotif & preventif serta efektivitas program JKN, antisipasi pasca Pandemi Covid-19);
- Pendidikan → Inovatif dan berdaya saing (Pengembangan PAUD, akses, pemerataan & kompetensi guru);
- Perlindungan sosial → sejahtera, menjaga daya beli serta pemberdayaan;
- Vokasional → terampil, akses pembiayaan, link & match.



INFRASTRUKTUR TRANFORMASI EKONOMI

- Infrastruktur yang mendukung tranformasi ekonomi al. ICT, konektivitas, energi, pangan;
- Pembangunan Ibu Kota Negara;
- Mendorong K/L pro aktif mengembangkan skema KPBU.



REFORMASI INSTITUTIONAL (INVESTASI DAN EKSPOR)



- Reformasi birokrasi agar efektif dan berintegritas;
- Simplifikasi, kemudahan usaha dan daya tarik investasi (UU CIKA,OSS, SWF);
- Penguatan pada rantai pasok dalam global value chain;
- Penguatan produk nasional yang berorientasi ekspor (program NIA).



MENGATASI SCARRING EFFECT DAN LIVING WITH ENDEMIC

- Adaptasi kebiasaan baru menjadi kultur;
- Sistem kesehatan yang handal;
- Perlindungan sosial yang adaptif;
- Pendidikan yang fokus dalam mengejar learning loss;
- Digitalisasi birokrasi dan layanan publik;
- Automatic stabilizer.



- Mitigasi perubahan iklim
- Mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi
- Green budget (al carbon tax, green sukuk, dukungan EBT)





Kebijakan Belanja Negara







MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA AGAR LEBIH EFISIEN NAMUN LEBIH PRODUKTIF (SPENDING BETTER)



EFISIENSI BELANJA BARANG

- Mendukung penerapan kebijakan inovasi pola kerja baru a.l flexible working space dan dukungan TIK untuk peningkatan efisiensi birokrasi
- 2. Mendukung penajaman dan sinkronisasi antara K/L & Pemda dalam belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda
- 3. Melanjutkan efisiensi belanja barang yang nonprioritas a.l honorarium, perjalanan dinas, dan paket *meeting*
- Melanjutkan pemeliharaan aset dengan lebih efisien

PENGUATAN BELANJA MODAL

- 1. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi, al konektivitas, energi, TIK, masalah perkotaan
- 2. Pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru
- 3. Mendorong agar K/L proaktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD dan BLU

PENGENDALIAN BELANJA PEGAWAI

- Melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas
- Mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
- 3. Mendorong Efektivitas belanja pegawai sebagai intrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi a.l pemberian Gaji/Pensiun ke-13

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BANSOS & SUBSIDI

- Meningkatkan kualitas basis data yang lebih akurat dan terintegrasi
- 2. Integrasi dan sinergi antarprogram bansos dan subsidi untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem
- Mendorong penguatan bansos bagi kelompok rentan a.l lansia, disabilitas
- 4. Mendorong pelaksanaan subsidi energi dan pupuk lebih tepat sasaran
- 5. Sinergi program bansos dengan program pemberdayaan berbasis produktivitas



Perbaikan Mekanisme Belanja K/L



Penguatan RSPP dengan penyempurnaan rumusan KRO/RO, perbaikan informasi indikator keluaran RKA-K/L menjadi lebih detail, informatif, dan *eye catching*.

Inisiasi pemanfaatan informasi kinerja (balanced scorecard) dalam mendukung informasi anggaran.

Benchmarking dan komparasi keluaran antar Program atau antar Bagian Anggaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja K/L.

Implementasi Standar Satuan Biaya (pilot project kemenkeu) akan diperluas penerapannya dalam rangka Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Anggaran melalui perumusan tahapan/cakupan kegiatan yang standar.

Penguatan implementasi prinsip *Let The Manager Manages* melalui penambahan wewenang kepada KPA dalam rangka proses revisi anggaran yang lebih fleksibel.

Penelaahan terhadap program/kegiatan/keluaran yang tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya untuk menghasilkan dana penghematan (efficiency dividen).

Reviu Belanja Kementerian/Lembaga dengan melibatkan BPKP.





Perbaikan Mekanisme Belanja K/L



Penerapan kebijakan *Basic Spending*, dimana K/L yang tidak memiliki kebijakan intervensi bidang-bidang pembangunan tertentu, anggarannya diarahkan hanya untuk dukungan operasional saja

Perhitungan, penyusunan, dan reviu baseline diarahkan menjadi lebih akurat.

Reformasi Belanja Operasional menjadi lebih efektif dan efisien seiring pola kerja dan adaptasi kebiasaan baru.

Sinkronisasi pengisian capaian keluaran pada level RO melalui aplikasi SAKTI oleh Satker/KPPN dengan aplikasi evaluasi kinerja penganggaran (SMART).

Sinergi penganggaran yang bersifat multi K/L, antara lain melalui penerapan Program/Kegiatan/Keluaran Lintas K/L yang komprehensif.

Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) ke Daerah.

Penguatan IT Penganggaran a.l. sinkronisasi aplikasi SatuDJA dengan SAKTI, sinkronisasi aplikasi SAKTI dengan aplikasi perencanaan (KRISNA).



Time Table



Jadwal Penelaahan RKA-K/L TA 2023, Perpres Rincian APBN TA 2023, dan Pengesahan DIPA K/L TA 2023

																																						_												
No	Uraian		р	Oktober												November														Desembe																				
NO	Ofdidii	29	30	1 2 3	3 4	5 6	7 8 9	9 10	11	12 1	3 14	15 1	<mark>16</mark> 17	7 18	19	20 2:	1 22	23	24 2	5 26	27	28	29 30	31	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11	12	13 14	15	16	17 18	19	20 2	21 2	2 23	24	25	26 2	27 28	8 29	30	1 2	3 4	5 6	7 8	9
	Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka persetujuan RUU APBN TA 2023																																																	
	Penyampaian Surat MK tentang Pagu Alokasi Anggaran FA 2023 berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI																																																	
	Penyampaian RKA-K/L TA 2023 oleh K/L kepada Kemenkeu dan Bappenas			П	П	П	П																																											
I I.	Penelaahan RKA-K/L TA 2023 oleh K/L, Kemenkeu, dan Bappenas			П	П	П	П																																											
5 P	Penyusunan Rancangan Perpres Rincian APBN TA 2023																																																	
1 1	Penetapan Perpres Rincian APBN TA 2023 oleh Presiden																																																	
7 P	Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2023				Ш	Ш																						Ш																						
8 P	Penyerahan DIPA TA 2023 oleh Presiden				\prod																							\prod																						\Box
9 P	Pencetakan DIPA TA 2023				П	Ш			Ш																	Ш		Ш					Ш																	\Box
10 P	Pendistribusian DIPA TA 2023				П	П																				П		П					ТΤ											T	П		ТП			

- Penyampaian RKAKL Pagu Alokasi Anggaran TA 2023 oleh K/L selambat-lambatnya pada tanggal 14 Oktober 2022
- Penelaahan selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2022





TERIMA KASIH

